

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 2 3



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Warta Kota

# DPRD: Cek Ulang Pencoretan 11.000 Penerima KJP

## Kebon Sirih, Warta Kota

DPRD DKI Jakarta kembali mengingatkan agar hasil penjangkaran aspirasi melalui reses anggota dewan dapat ditindaklanjuti oleh Pemerintah DKI Jakarta. Apalagi kegiatan reses anggota dewan telah mengacu pada peraturan perundang-undangan.

“Hasil reses di lapangan ini menjadi kewajiban pemerintah dalam hal ini eksekutif untuk memasukannya dalam RKPD (rencana kerja pemerintah daerah),” kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin saat rapat paripurna penyampaian hasil reses ke-2 tahun 2023 di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (18/7/2023).

Berdasarkan hasil reses ke-2 pada 15 Mei sampai 28 Juni tahun 2023 ditemukan sejumlah hal spesifik yang perlu penanganan segera oleh pihak terkait, termasuk Pemerintah Provinsi

(Pemprov) DKI Jakarta. Salah satunya adalah masalah pencoretan penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang banyak dikeluhkan masyarakat.

“KJP ini memang tahun ini banyak keluhan dari masyarakat, karena Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dipadukan dengan data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), ketika penerima KJP terbukti membayar pajak mobil, pajak motor, pajak tanah, maka langsung dicoret,” jelasnya.

“Tahun ini ada 11.000 orang penerima KJP dicoret. Nah ini nanti kami bicarakan khusus dengan Pj Gubernur karena tidak semua orang yang punya motor itu mampu. Ada yang motor yang dipakai keliling untuk usaha. Jadi, tolong dievaluasi lagi dan jangan dipukul rata semuanya,” lanjut pria yang juga menjadi Ketua DPW PKS DKI Jakarta ini.

Dalam forum rapat paripurna itu Sekretaris Komisi B DPRD DKI Jakarta Wa Ode Herlina membacakan kompilasi hasil kegiatan reses ke-2 tahun 2023 di ruang rapat paripurna. Dia mengatakan, aspirasi masyarakat itu merupakan hasil reses semua anggota DPRD

DKI Jakarta di daerah pemilihan masing-masing.

“Merupakan kewajiban anggota dewan untuk menyerap aspirasi masyarakat maka penting bagi anggota dewan untuk turun langsung menemui warga masyarakat dalam rangka menjangkari aspirasi dan hal-hal yang menjadi kebutuhan masyarakat,” imbuhnya.

Untuk bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pendidikan, DPRD meminta Pemprov DKI Jakarta melakukan pemeriksaan ulang data penerima KJP karena terindikasi ada perubahan data yang menyebabkan sebagian nama penerima KJP dicoret.

“Dalam hal pemberian KJP, mohon Eksekutif melakukan pengecekan ulang mengenai adanya perubahan database KJP mengingat ada warga yang sebelumnya mendapat KJP namun saat ini tidak mendapatkan KJP,” katanya.

Selain itu, di antaranya adalah poin terkait Bidang Pemerintahan, Pertanahan, dan Ketertiban Umum di mana DPRD meminta Pemprov DKI memperketat pengawasan hutan dan taman kota dari aksi kriminalitas dan perbuatan negatif lainnya. (faf)